

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

Ahmad Rubaei, 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Bayumedia., Malang,.

Berhard Limbong, 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan.

Djuhaendah Hasan, 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT Citra aditya Bakti, Bandung.

Henry Campbell Black, 1968. *Black's Law Dictionary Definition of terms Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. West Publishing Co, S.T Paul Minn.

John Salindeho, 1998. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta.

John W Brush, 2006, *Reforming Land Law to Acieve Development Goals on Land Law Reform*, The International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, Washington D,

Maria Sumardjono, 2001. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.

Mudzakir Iskandar Syah,. 2015. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jala Permata Aksara, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara atas Tanah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 284

Von Schmid, 1954. *Ahli Pemikir Bangsa dan Negara Hukum Pembangunan*, Pembangunan Djakarta, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP).

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 3 Tahun
2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik jo. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 Tentang Perubahan Atas
Permenkeu No 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan Ketentuan
mengenai Pembebasan Lahan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012–2032.

Petunjuk Teknis SPI 306, Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia dan Masyarakat
Penilai Indonesia (MAPPI), 2015

C. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2263/PDT/1993

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Pmn

D. TESIS

Kasdin simanjuntak, 2008. *Penerapan Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol*. Tesis, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E. JURNAL, MAKALAH, DAN LAPORAN PENELITIAN

BoediHarson, 1994. *Kasus-kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan Suatu Tinjauan Yuridis*, Makalah Disajikan Dalam Seminar Nasional "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Konsepsi Hukum, Permasalahan dan kebijaksanaan Dalam Pemecahannya)". Kerjasama Fakultas Hukum Trisakti dengan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta

FX. Sumarja, 2019. *Eksistensi Lembaga Penilai Dalam Pengadaan Tanah*, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol, 5, Jakarta

Indra Mudrawan, 2014. *Pelayanan Publik di Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Dinamika dan Problematika dalam Bunga Rampai Administrasi Publik*. Lembaga Administrasi Negara

Konsorsium Pembaruan Agraria 2014. *Data Catatan Akhir Tahun 2014 Membenahi Masalah Agraria: Prioritas Kerja Lokal pada 2015*, Jakarta Selatan

Konsorsium Pembaruan Agraria, 2015. *Data Catatan Akhir Tahun 2015 Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi*, Jakarta Selatan.

Konsorsium Pembaruan Agraria, 2016. *Data Catatan Akhir Tahun 2016, Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokan*, Jakarta Selatan.

Konsorsium Pembaruan Agraria, 2017. *Data Catatan Akhir Tahun 2017: Reforma Agraria Dibawah Bayang Bayang Investasi*. Jakarta Selatan.

Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018. *Data Catatan Akhir Tahun 2018, Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*, Jakarta Selatan.

Imam Koeswahyono, 2008. *Melacak konstitusionalitas Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Hukum.

Marek Walacik dan Sabina Zrobek, 2010, *Chosen Principles Of Land Acquisition for Public Purposes and Just Compensation Determination In Poland dalam Some Aspect Of Compulsory Purchase of Land For Public Purposes*. Polish Real Estate Scientific Society, Olsztyn.

Yanto Sufriadi, 2011. *Penyebab Terjadinya Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (studi kasus sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Bengkulu). Jurnal Hukum

